

BAB I

PENDAHULUAN DAN TELAAH LITERATUR

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka APBD selalu menjadi tolak ukur akan kemajuan bangsa Indonesia. Pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan intra struktur merupakan target dariadanya APBD itu sendiri.

Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Menurut (Halim & Kusufi, 2017) Ada dua pendekatan tipe anggaran yaitu Anggaran yang disediakan (*imposed budget*) dan Anggaran partisipasi (*participative budgets*). Dalam prakteknya *Imposed budgets* disusun oleh manajemen puncak atau komite anggaran dan disampaikan kepada manajemen menengah dan bawah. Pendekatan ini sering juga disebut dengan “*top down approach*”, dimana komitmen organisasi tanpa ada konsultasi dari level menengah dan bawah. Kelebihan dari pendekatan ini adalah biaya yang kecil dan waktu yang tidak terlalu lama dalam penyusunannya karena tidak banyak orang yang terlibat.

Disamping itu beberapa kekurangan dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini kurang tepat terhadap prinsip pendelegasian. Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran. Pada pertengahan tahun seharusnya realisasi penyerapan anggaran sudah mencapai 50% dan di akhir tahun dapat dimaksimalkan menjadi 100%.

Namun yang kerap terjadi lambatnya proses penyerapan anggaran, dengan awal penyerapan yang cenderung rendah pada awal tahun dan menumpuk di akhir tahun (Rifai, dkk., 2016). Fenomena ini juga terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dimana dapat dilihat realisasi anggaran belanja pendapatan dan barang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 pada tabel dibawah ini

Tabel 1. 1

Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran	Total Realisasi	Rasio Efektivitas
1	2016	982.178.816.233,23	810.002.815.632,78	82,47
2	2017	1.197.570.833.423,12	1.066.164.746.908,50	89,03
3	2018	973.636.004.582,71	877.213.285.747,40	90,10
4	2019	1.088.364.437.746,63	954.075.863.963,57	87,66
5	2020	1.179.468.781.738,14	1.060.601.781.158,26	89,92
6	2021	298.118.808.474,00	245.107.576.769,17	82,22

Sumber: Pengelola Keuangan SKPD Kabupaten Nias Selatan

Tabel 1. 2
Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran	Total Realisasi	Rasio Efektivitas
1	2016	1.118.389.986.122,60	1.008.887.209.661,00	90,21
2	2017	1.257.325.334.886,18	1.126.563.468.536,07	89,60
3	2018	1.228.961.604.859,00	1.164.834.186.729,02	94,78
4	2019	1.395.972.683.504,00	1.311.187.399.569,75	93,93
5	2020	1.483.534.952.584,80	1.459.870.566.296,50	98,40
6	2021	1.461.332.092.084,00	1.401.145.247.615,16	95,88

Sumber: Pengelola Keuangan SKPD Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, menunjukkan realisasi belanja dari tahun 2016-2021 terjadi selisih yang tidak menguntungkan (*unfavourable*) hal tersebut terjadi karena nilai realisasi tidak mencapai atau melebihi dari anggaran, sementara menurut (Halim & Kusufi, 2017) Jika hasil pencapaian realisasi belanja antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.

Dari tabel 1.2 dapat dilihat tidak efektifnya anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan karena nilai persentase realisasi tidak mencapai 100%, sementara menurut (Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa efektivitas dari penyusunan anggaran apabila nilai rasio efektivitas mencapai 100% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan belum berjalan dengan baik karena setiap tahunnya anggaran pendapatan dan belanja yang disusun oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan dan tidak sesuai dengan realisasi yang dicapai.

Identifikasi Masalah

1. Realisasi pendapatan dari tahun 2016-2021 terjadi selisih yang tidak menguntungkan (*unfavourable*).
2. Tidak efektifnya anggaran yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan karena nilai persentase realisasi tidak mencapai 100%.
3. Kejelasan anggaran yang disusun oleh Kabupaten Nias Selatan belum berjalan dengan optimal karena setiap tahunnya realisasi pendapatan yang disusun oleh Kabupaten Nias Selatan tidak tercapai nilai anggaran pendapatannya.
4. Dalam hal penyusunan anggaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan/anggaran sangatlah penting, tetapi tidak semua pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk ikut dalam menyusun anggaran.

5. Rendahnya komitmen para pegawai akan mengganggu kegiatan pelaksanaan program OPD, akibatnya terjadi ketidakdisiplinan pegawai, selanjutnya tidak adanya keinginan dan kesiapan individu dalam organisasi untuk menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab pekerjaan.
6. Inkonsistensi penelitian terdahulu

Perumusan Masalah

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap Realisasi Anggaran?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Realisasi Anggaran?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap Realisasi Anggaran?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran pada Kabupaten Nias Selatan?
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran pada Kabupaten Nias Selatan?
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran pada Kabupaten Nias Selatan?
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah Komitmen Organisasi memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Realisasi Anggaran pada Kabupaten Nias Selatan?
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah Komitmen Organisasi memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Realisasi Anggaran pada Kabupaten Nias Selatan?
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah Akuntabilitas memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Realisasi Anggaran pada Kabupaten Nias Selatan?

1.2. LANDASAN TEORI DAN TELAAH LITERATUR

1.2.1. Landasan Teori

1.2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) menggambarkan sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Hal ini membantu dalam menerapkan berbagai mekanisme tata kelola untuk mengendalikan tindakan pemerintah di perusahaan yang dimiliki bersama (Panda & Leepsa, 2017)

Teori agen berpendapat bahwa terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen yang menimbulkan konflik kepentingan. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan agen. Laporan keuangan menjadi salah satu alat memonitoring untuk mengurangi adanya *agency cost* (Kasmawati, 2021)

1.2.1.2. Teori Stewardship

Theory stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

1.2.1.3. Teori Sinyal (*Signalling*)

Teori sinyal atau *signalling theory* juga menjelaskan alasan suatu perusahaan mempunyai dorongan dalam memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dalam penelitian ini, teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah menjadi pihak yang ditunjuk oleh masyarakat untuk memberikan sinyal kepada masyarakat juga dengan cara memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

2.1.4. Teori Kegunaan-Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna informasi akuntansi.

1.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah**
- H2 : Kejelasan Sasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah**
- H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran pemerintah Daerah**
- H4 : Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Realisasi Anggaran Keuangan Daerah.**
- H5 : Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah.**
- H6 : Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Realisasi Anggaran Daerah.**